

Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Syariah AL-HISBAH

Volume 1 – Nomor 2, Agustus 2012

## **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA PUBLIK KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 2006-2009**

**Khoirul Aswar**

*UPN Veteran Jakarta*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to prove empirically effect of fiscal decentralization on PAD and public spending district/ city in Java. Data were collected based APBD report in 2006 until 2009. This data includes PAD, DP, and other income as a proxy of fiscal decentralization and size of public spending. Data were analyzed by means of classical assumption correlation and partial correlation using Statistical Package for Social Sciences (SPSS).*

*The result of the analysis has been able to demonstrate empirically the effect of fiscal decentralization on PAD in the district / city on in Java. Fiscal decentralization is more focused on expenditure decentralization and not offset by revenues decentralization. This study also proved the positive effect of fiscal decentralization on the size of public spending. While the loan variable regions have a less significant effect when compared with equalization funds variable and other acceptance legitimate.*

**Key word:** *Fiscal Desentralization, PAD, Public spending, equalization funds.*

## LATAR BELAKANG

Di Indonesia, pembangunan merupakan sektor fisik yang sangat penting, khususnya pembangunan daerah, merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan nasional. Hal ini berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah mempunyai hubungan yang sangat erat, baik mencakup bidang keuangan maupun faktor strategis pembangunan dan pengawasan terhadap daerah. Agar hubungan tersebut dapat terealisasi, maka pemerintah pusat melimpahkan sebagian tugas dan wewenang kepada pemerintah daerah. Sebagai akibat dari pelimpahan tugas dan wewenang tersebut, pemerintah pusat harus menyerahkan sebagian sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Davey (1989) bahwa hubungan keuangan pusat dan daerah pada prinsipnya lebih menyangkut persoalan tentang pembagian kekuasaan. Terutama hak untuk mengambil keputusan mengenai anggaran, yaitu bagaimana memperoleh dan membelanjakannya.

Undang-undang pertama yang mengatur tentang pemerintahan daerah berikut hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah Undang-undang No.5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang No.5 tahun 1974 ini telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip: Pertama, *desentralisasi* yang berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Kedua, *dekonsentrasi* yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Ketiga, *tugas perbantuan (medebewind)* yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal di daerah dan wakil pusat di daerah. Namun pada kenyataannya pelaksanaan UU No. 5 tahun 1974 tidak optimal, dimana terjadi sentralisasi yang dominan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan (Kuncoro, 2004).

Oleh sebab itu, UU No. 5 tahun 1974 disempurnakan oleh UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun dalam pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tersebut terdapat berbagai kelemahan. Sehingga UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 34 tahun 2004 dikeluarkan untuk lebih menyempurnakan UU sebelumnya (Khusaini, 2006).

Dengan adanya perubahan ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan seluruh fungsi pemerintahan, kecuali kewenangan pemerintahan dalam bidang pertahanan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, agama, dan administrasi pemerintahan yang bersifat strategis.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pada prinsipnya ialah penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintah membawa konsekuensi anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut, sehingga ada keseimbangan antara kewenangan/urusan dan tanggung jawab yang diserahkan kepada daerah dengan sumber pendanaannya. Perimbangan keuangan dilakukan melalui mekanisme dana perimbangan, yaitu pembagian penerimaan antar tingkatan pemerintahan guna menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam kerangka desentralisasi. Selain itu desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan daerah di Indonesia. Oleh karena itu di era desentralisasi fiskal ini pemerintah pusat memberikan skema bantuan transfer kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan pusat daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang bertujuan mengatasi masalah kesenjangan antar daerah (ketimpangan horisontal) dan dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam untuk mengatasi masalah ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah (ketimpangan vertikal) serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun realitasnya karakteristik daerah di Indonesia sangat beraneka ragam.

Ada daerah dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, ada juga daerah yang tidak memiliki kekayaan alam yang besar namun karena struktur perkonomian yang telah tertata dengan baik maka potensi pajak dapat dioptimalkan sehingga daerah tersebut menjadi kaya. Tetapi banyak juga daerah yang secara alamiah maupun struktur ekonomi masih sangat tertinggal. Oleh sebab itu diperlukannya suatu mekanisme dalam mengatur perimbangan keuangan antara pusat dengan daerah guna membiayai tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah. Mekanisme yang dilakukan adalah pemerintah pusat memberikan dana transfer berupa hasil pajak bagi hasil non pajak (sumber daya alam), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana transfer ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah.

Selain kegiatan operasional terdapat juga kegiatan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membutuhkan dana, oleh sebab itu pemerintah daerah diwajibkan untuk mengelola pendapatan sendiri. Berdasarkan UU No 33 tahun 2004, penerimaan daerah selain dana perimbangan dari pusat dapat berasal dari PAD dan pendapatan lain-lain yang sah. Sehingga pemerintah daerah dapat mengeksplorasi sumber dana yang ada di daerahnya seperti Pendapatan Asli Daerah. Sumber dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan adalah Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan belanja publik?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal terhadap peningkatan belanja publik.

## **RERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **1. Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, pemerintah daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Desentralisasi fiskal menyebabkan beberapa pergeseran tanggung jawab terhadap pendapatan (*revenue*) dan / atau pembelanjaan (*expenditure*) ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. Desentralisasi fiskal diyakini memberikan berbagai manfaat. Bahl (1999) menyebutkan manfaat desentralisasi yang paling utama adalah kedekatan pemerintah pusat dengan rakyat di daerah. Hal ini berakibat pada mudahnya suatu layanan dapat diakses oleh publik dengan harga terjangkau. Manfaat lainnya adalah meningkatnya basis untuk penetapan pajak secara komprehensif. Oates dalam Bird dan Vaillancourt (2000) menyatakan bahwa sepanjang tidak terdapat skala ekonomis, penyediaan yang terdesentralisasi atas pelayanan-pelayanan pemerintah akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan yang melimpah. Penelitian lain menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal yang diwujudkan dalam bentuk belanja daerah dan pendapatan daerah dapat memacu pemerintah daerah untuk meningkatkan kemakmuran daerah masing-masing (Jin et al. 1999). Selain itu, otonomi terhadap belanja daerah dan pendapatan daerah akan meningkatkan insentif fiskal yang mendorong daerah untuk membangkitkan pendapatan asli daerahnya (Zuravskaya,1998). Penerapan desentralisasi fiskal dapat memberikan keleluasaan kepada masing-masing daerah untuk memperoleh pendapatan daerah secara lebih optimal, namun hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam menetapkan pajak dan pengeluaran daerah. Hal ini akan menghambat iklim investasi, penyediaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut sebagai akibat dari banyaknya jenis dan tarif pajak yang berbeda-beda.

Desentralisasi fiskal diukur dengan cara membandingkan antara jumlah belanja daerah dengan jumlah belanja pusat (Zhang dan Zou, 1998). Rasio yang diperoleh akan menentukan derajat desentralisasi. Dengan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh terhadap belanjanya, semakin tinggi rasio tersebut, semakin tinggi pula tingkat desentralisasinya.

## **2. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah**

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dijelaskan bahwa dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

### **3. Desentralisasi Fiskal dan Pendapatan Asli Daerah**

Pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerah yang dapat memaksimalkan pembangunan di daerahnya serta sekaligus mensinkronisasikan pembangunan tersebut untuk percepatan pembangunan. Selayaknya pemerintah kabupaten dan kota mengembangkan sumber daya sendiri dan dapat mengurangi ketergantungan dari Pusat (Bahl, 1999; *World Bank*, 2003). Menurut Halim (2001), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan asli daerah terdiri atas: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan (antara lain: bagaian laba, dividen, dan penjualan saham milik daerah), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (antara lain hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan,

ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh Daerah). Menurut Nick Devas bahwa untuk menilai pendapatan asli daerah tersebut harus berlandaskan pada beberapa kriteria, antara lain: hasil (*Yield*), keadilan (*Equity*), efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*), dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Adapun tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah tersebut pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik baik yang dibiayai pemerintah pusat maupun daerah melalui PAD (Ananda, 2002). Untuk dapat menjalankan desentralisasi fiskal secara efektif, pemerintah daerah otonom harus memiliki penerimaan yang besar agar dapat menjalankan fungsi desentralisasi yang diberikan kepada daerahnya (Litvack dan Seddon, 2002). Idealnya semua pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan PAD-nya, sehingga daerah menjadi benar-benar otonom.

#### **4. Desentralisasi Fiskal dan Pelayanan Publik**

Beberapa pemerintah daerah mulai memberikan perhatian lebih pada pelayanan publik (IRDA 2002). Keinginan untuk meningkatkan layanan mendorong persaingan positif di antara unit-unit layanan yang berbeda. Sebagai hasilnya, beberapa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah meningkat. Pelayanan publik yang mendapatkan perhatian adalah terutama yang berhubungan dengan kesehatan, administrasi publik, dan keamanan. Salah satu keuntungan desentralisasi fiskal adalah diberikannya kebebasan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan daerah dengan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut UU No.25 tahun 1999 tentang pelaksanaan desentralisasi, guna melaksanakan pelayanan publik, maka harus didukung oleh sumber dana yang memadai, seperti dana dari pemerintah pusat yang tidak hanya digunakan untuk membiayai belanja rutin daerah, tetapi juga untuk mendukung belanja pelayanan publik. Selain itu pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin, seperti memaksimalkan pajak dan menggunakan pinjaman daerah.

Pemerintah pusat berusaha mengatasi masalah ketimpangan pendapatan antar daerah dengan memberikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan operasional. Selain dana perimbangan, penerimaan lain-lain yang sah, pinjaman

daerah juga diharapkan dapat bertindak sebagai acuan dalam belanja publik. Guna melaksanakan pelayanan publik tersebut menurut UU no 25 th 1999 tentang pelaksanaan desentralisasi dalam melaksanakan pelayanan publik maka harus di dukung oleh sumber dana yang memadai, seperti pemerintah pusat memberikan dana transfer yang bukan hanya digunakan untuk membiayai belanja rutin daerah, tetapi juga untuk mendukung belanja pelayanan publik yang ditunjukkan kepada masyarakat.

## **5. Hipotesis Penelitian**

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Selama tahun 2001–2003 peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan total pengeluaran APBD semakin menurun. Menurunnya peranan PAD terhadap pengeluaran rutin dan pengeluaran total dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan peranan mekanisme transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan (Mahi, 2005) dalam penelitian Waluyo (2007). Tujuan utama pemberian dana perimbangan dalam kerangka otonomi daerah untuk pemerataan kemampuan fiskal pada tiap daerah (*equalizing transfer*) (Ehtisham, 2002) dalam penelitian Waluyo (2007). Ketergantungan terhadap dana perimbangan seperti DAU merupakan hambatan bagi pemerintah daerah dalam memperoleh dan mengintensifkan pendapatan asli daerahnya (Brodjonegoro, 2002). Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian pemerintah Daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat harus semakin kecil (Sidik, 2002).

Bappenas (2003) menyatakan bahwa dalam era otonomi seharusnya peran PAD semakin besar dalam membiayai berbagai belanja daerah. Seiring dengan peningkatan (pertumbuhan) meningkatnya pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula, sehingga penerimaan PAD menjadi semakin tinggi.

Penelitian Agus Purwantoro 2007 yang meneliti tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Dah hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal (dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain) berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya dana perimbangan, maka akan membawa pengaruh positif terhadap



besarnya pendapatan asli daerah. Dari beberapa pernyataan dan hasil penelitian di atas maka dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut:

**H 1a: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap PAD**

**H 1b: Pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap PAD**

**H 1c: Penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap PAD**

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Publik**

Berdasarkan penelitian Abdullah dan Halim (2004) menemukan bahwa sumber pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis (Abdullah, 2004; Abdullah dan Asmara, 2006). Sementara dana perimbangan merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah (sekitar 90-95%), namun bersifat *contingent* karena ditentukan oleh pemerintah pusat.

Penelitian Agus Purwanto 2007 yang meneliti tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap besarnya belanja publik. Transfer dana perimbangan ke daerah dan penerimaan lain-lain yang sah mempengaruhi jumlah belanja publik daerah. Sedangkan variabel pinjaman daerah mempunyai pengaruh yang kurang signifikan bila dibandingkan dengan variabel dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah.

Dari penjelasan dan hasil penelitian diatas maka dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut:

**H2a: Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja publik**

**H2b: Pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap belanja publik**

**H2c: Penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh positif terhadap belanja public**

## METODOLOGI PENELITIAN

### Jenis dan Sumber Data

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di pulau Jawa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data laporan realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2006 sampai dengan 2009. Data ini mencakup jumlah pendapatan asli daerah, total dana perimbangan, jumlah pendapatan lain-lain sebagai proksi dari desentralisasi fiskal dan besarnya belanja publik kabupaten/kota di Indonesia sebagian besar diperoleh dari instansi yang terkait baik Direktorat Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (<http://www.djpkpd.or.id>). Metode Pengambilan Sampel (*sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode time series, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu (M.A., Supranto J., 1992).

### Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah sebagai variabel bebas (*independent variable*) yang diukur dengan menggunakan jumlah realisasi anggaran dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah tahun 2006 sampai dengan 2009.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam model persamaan 1a, 1b, 1c sebagai variabel terikat (*dependent variable*) yang diukur dengan menggunakan jumlah realisasi PAD itu sendiri.
3. Belanja publik sebagai variabel terikat (*dependent variable*) dalam model persamaan 2a, 2b, 2c diukur dengan menggunakan jumlah realisasi belanja pembangunan pada tahun anggaran.

**Alat Analisis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model regresi sederhana untuk mengembangkan persamaan-persamaan yang ada, dan memberikan perkiraan.

Persamaan regresi berikut akan digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang ada :

- Persamaan 1a (untuk menguji hipotesis 1a)..... **Pad = c + α<sub>1</sub> Daimb + e ;**
- Persamaan 1b (menguji hipotesis 1b) ..... **Pad = c + α<sub>2</sub> Pindae +e;**
- Persamaan 1c (menguji hipotesis 1c)..... **Pad = c + α<sub>3</sub> Pnrlain +e;**
- Persamaan 2a (untuk menguji hipotesis 2a)..... **PubExp = c + α<sub>1</sub> Daimb + e ;**
- Persamaan 2b (menguji hipotesis 2b)..... **PubExp = c + α<sub>2</sub> Pindae +e;**
- Persamaan 2c (menguji hipotesis 2c) ..... **PubExp = c + α<sub>3</sub> Pnrlain +e;**

**HASIL**

**Analisis Deskriptif**

Analisis dilakukan selama 4 tahun yaitu tahun 2006 – 2009 yang telah memiliki kriteria untuk diolah lebih lanjut. Hasil pengolahan data mengenai deskripsi variabel penelitian secara keseluruhan disajikan dalam tabel dibawah ini

**Statistik Deskriptif Variabel**

**N=386**

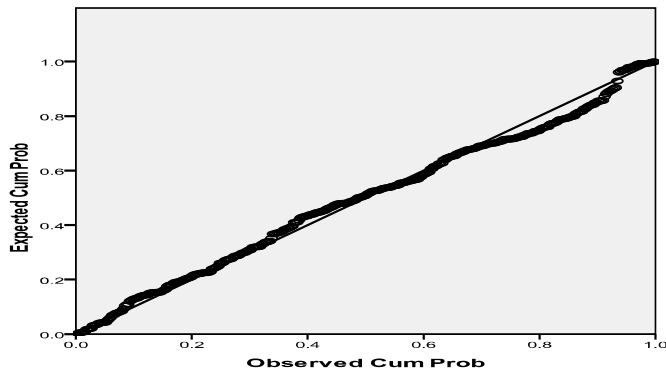
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	386	11,11	11134548,00	214961,2634	1051634,50128
BP	386	64,18	22139467,00	651952,4147	1663496,41383
DP	386	16,62	9540000,00	373628,2242	694521,09055
PD	386	1,00	18074,50	497,5713	2716,96809
PLL	386	2,32	978954,90	30353,8606	73379,04532
Valid N(listwise)	386				

**Pengujian Normalitas Data**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model

yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghazali, 2005). Hasil normalitas yang disajikan dalam grafik berikut ini:

**Grafik**  
**Hasil Uji Normalitas**



Berdasarkan tampilan grafik *normal probability plot*, terlihat bahwa pola grafik normal terlihat dari titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

**Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test).

**Hasil Uji Autokorelasi**  
**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,929(a)	,864	,854	166877,46 521	2,005

a Predictors: (Constant), PLL, PD, DP

b Dependent Variable: BP

**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,996(a)	,992	,992	4517,5973 2	1,863

a Predictors: (Constant), PLL, PD, DP

b Dependent Variable: PAD

Nilai Durbin-Watson untuk persamaan Ia,1b dan 1c sebesar 2,005, terletak diantara  $du < d < 4-dl$ . Hasil perhitungan menunjukkan nilai  $du$  sebesar 1,778 dan nilai  $4-du$  sebesar 2,24. Sedangkan nilai Durbin-Watson untuk persamaan IIa,IIb dan IIc sebesar 1,863 terletak diantara  $du < d < 4-dl$ . Hasil perhitungan menunjukkan nilai  $du$  sebesar 1,778 dan nilai  $4-du$  sebesar 2,24. Oleh karena itu model penelitian dapat digunakan.

**Pengujian Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas merupakan uji yang ditujukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Wijaya, 2009). Model uji regresi selayaknya tidak terjadi multikolinearitas. Jika terjadi multikolinearitas, maka kekuatan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen akan semakin berkurang dan kolinearitas yang tinggi akan mendistorsi hasil (Hair, 1998).

**Hasil Uji Multikolinearitas****Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-334,655	739,192		-,453	,653		
	DP	-,022	,006	-,129	-3,672	,001	,157	6,373
	PD	1,481	,280	,082	5,296	,000	,822	1,216
	PLL	1,878	,058	1,100	32,294	,000	,168	5,946

a Dependent Variable: PAD

Hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* adalah lebih dari 0,1 yaitu 0,157, 0,822 dan 0,168. Nilai VIF adalah kurang dari 10 yaitu 6,373, 1,216 dan 5,946, sehingga dalam model regresi tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

### Pengujian Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika Variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi yang ada, digunakanlah Uji Glejser. Suatu model dikatakan bebas dari heteroskedastisitas probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%.

#### Hasil Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser)

Variabel	Signifikansi	Alpha	Kesimpulan
Dana Perimbangan	0.675	0.05	Homoskedastisitas
Pinjaman Daerah	0.601	0.05	Homoskedastisitas
Penerimaan Lain-lain yang sah	0.105	0.05	Homoskedastisitas

### Pengujian Hipotesis

#### 1. Pengujian Hipotesis 1a, 1b dan 1c

##### Hasil Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, Penerimaan Lain-lain Terhadap PAD Kota/Kabupaten di Pulau Jawa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-334,655	739,192		-,453	,653
DP	-,022	,006	-,129	-3,672	,001
PD	1,481	,280	,082	5,296	,000
PLL	1,878	,058	1,100	32,294	,000

a Dependent Variable: PAD

### **Pengujian Hipotesis 1a**

Hipotesis 1a menyatakan bahwa Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil pengujian diatas Hipotesis 1a: pengaruh dana perimbangan terhadap PAD dengan menggunakan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -3,672 dengan nilai p value 0,001. Karena nilai p value  $0,001 < 0,05$  dapat disimpulkan hipotesis 1a berhasil dibuktikan, artinya dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil analisis diperoleh nilai  $Adj R^2 = 0,992$ . Angka ini menunjukkan bahwa variasi pendapatan asli daerah yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 99,2 persen sedangkan sisanya, yaitu 0,8 persen, dijelaskan oleh variabel lain di luar model model.

Oleh karena itu, bukti empiris tersebut berhasil mendukung hipotesis (H1a) bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di pulau Jawa.

### **Pengujian Hipotesis 1b**

Hipotesis 1b menyatakan bahwa Pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil pengujian diatas pengaruh pinjaman daerah terhadap PAD dengan menggunakan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 5,296 dengan nilai p value 0,000. Karena nilai p value  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan hipotesis 1b berhasil dibuktikan, artinya dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil analisis diperoleh nilai  $Adj R^2 = 0,992$ . Angka ini menunjukkan bahwa variasi pendapatan asli daerah yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 99,2 persen sedangkan sisanya, yaitu 0,9 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model model.

Dengan demikian, bukti empiris berhasil mendukung hipotesis (H1b) bahwa dana pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan adanya keterkaitan antara pinjaman daerah dengan pendapatan asli daerah yang dimiliki.

### Pengujian Hipotesis 1c

Hipotesis 1c menyatakan bahwa Penerimaan Lain-lain berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil pengujian diatas pengaruh penerimaan lain-lain terhadap PAD dengan menggunakan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 32,294 dengan nilai p value 0,000. Karena nilai p value  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan hipotesis 1c berhasil dibuktikan, artinya pendapatan lain-lain berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Dari hasil analisis diperoleh nilai  $Adj R^2 = 0,992$ . Angka ini menunjukkan bahwa variasi pendapatan asli daerah yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 99,2 persen sedangkan sisanya, yaitu 0,8 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model model.

Oleh karena itu, bukti empiris ini berhasil mendukung hipotesis (H1c) bahwa penerimaan lain yang sah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan lain yang sah yang diterima maka semakin tinggi pendapatan asli daerah yang dimiliki.

## 2. Pengujian Hipotesis 2a, 2b dan 2c

### Hasil Estimasi Pengaruh Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Penerimaan lain-lain Terhadap Belanja Publik Kota/Kabupaten di Pulau Jawa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1						
	(Constant)	26668,017	27305,321		,977	,335
	DP	,897	,225	,587	3,981	,000
	PD	-,821	10,330	-,005	-,080	,937
	PLL	5,533	2,149	,367	2,575	,014

a Dependent Variable: BP

### Pengujian Hipotesis 2a

Hipotesis 2a menyatakan bahwa Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja publik. Berdasarkan hasil pengujian diatas pengaruh dana perimbangan terhadap Belanja publik dengan menggunakan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 3,981 dengan nilai p value 0,000. Karena nilai p value  $0,000 < 0,05$  dapat disimpulkan hipotesis 2a berhasil



dibuktikan, artinya dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja publik. Dari hasil analisis diperoleh nilai  $Adj R^2 = 0,854$ . Angka ini menunjukkan bahwa variasi belanja pembangunan yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 85,4 persen sedangkan sisanya, yaitu 14,6 persen, dijelaskan oleh variabel lain di luar model model.

Dengan demikian, bukti empiris berhasil mendukung hipotesis (H2a) bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap belanja publik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dana perimbangan yang diterima maka semakin tinggi belanja pembangunan yang dikeluarkan.

### **Pengujian Hipotesis 2b**

Hipotesis 2b menyatakan bahwa Pinjaman daerah berpengaruh positif terhadap Belanja publik. Berdasarkan hasil pengujian diatas pengaruh pinjaman daerah terhadap belanja publik dengan menggunakan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar -0,080 dengan nilai p value 0,937. Karena nilai p value  $0,937 > 0,05$  dapat disimpulkan hipotesis 2b tidak berhasil dibuktikan, artinya dana perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap belanja publik. Dari hasil analisis diperoleh nilai  $Adj R^2 = 0,854$ . Angka ini menunjukkan bahwa variasi belanja pembangunan yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 85,4 persen sedangkan sisanya, yaitu 14,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model model.

Dengan demikian, bukti empiris berhasil tidak mendukung hipotesis (H2b) bahwa dana pinjaman daerah berpengaruh terhadap belanja publik. Hasil ini tidak menunjukkan adanya keterkaitan yang signifikan antara pinjaman daerah dengan belanja pembangunan yang dikeluarkan.

### **Pengujian Hipotesis 2c**

Hipotesis 2c menyatakan bahwa Penerimaan Lain-lain berpengaruh positif terhadap Belanja publik. Berdasarkan hasil pengujian diatas pengaruh penerimaan lain-lain terhadap belanja publik dengan menggunakan program SPSS diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 2,575 dengan nilai p value 0,014. Karena nilai p value  $0,014 < 0,05$  dapat disimpulkan hipotesis 2c berhasil dibuktikan, artinya pendapatan lain-lain berpengaruh positif terhadap belanja publik. Dari hasil analisis diperoleh nilai  $Adj R^2 = 0,845$ . Angka ini menunjukkan bahwa variasi belanja

pembangunan yang dapat dijelaskan oleh model regresi sebesar 84,5 persen sedangkan sisanya, yaitu 14,6 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model model.

Dengan demikian, bukti empiris berhasil mendukung hipotesis (H2c) bahwa penerimaan lain yang sah berpengaruh terhadap belanja publik. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar penerimaan lain yang sah yang diterima maka semakin besar belanja pembangunan yang dikeluarkan daerah.

### **3. Analisis Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat membuktikan pengaruh dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain yang pada kenaikan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, meskipun ada faktor-faktor lain di luar penelitian ini yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah tersebut. Nilai adjusted *r square* yang diperoleh dari uji hipotesis Ia, 1b dan 1c adalah 0,992. Hal ini menunjukkan variasi pendapatan daerah yang dapat dijelaskan oleh pengaruh dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain-lain adalah sebesar 99,2 % dan 0,8% dijelaskan variabel lain diluar penelitian. Hasil ini cukup menunjukkan bahwa dana perimbangan, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang sah berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa secara keseluruhan.

Variabel pinjaman daerah di beberapa kabupaten / kota bernilai 0 (nol) yang menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak memiliki pinjaman. Hal ini mungkin juga berpengaruh terhadap kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD yang lebih tinggi lagi. Jika suatu daerah memiliki pinjaman, maka daerah tersebut harus membayar pokok pinjaman dan bunga yang dicicil dengan menggunakan dana yang berasal dari PAD. Ketiadaan pinjaman daerah dapat berpengaruh negatif terhadap jumlah belanja daerah. Sebenarnya daerah dapat melakukan pinjaman jangka panjang guna membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayan masyarakat. Selain itu, daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan kas daerah. Oleh sebab itu, daerah yang tidak melakukan peminjaman tidak dapat meningkatkan pengeluarannya terutama pengeluaran untuk kepentingan publik.

Hasil pengujian terhadap hipotesis 2a dan 2c untuk Kabupaten/Kota di Pulau Jawa secara statistik diterima karena nilai signifikansinya (masing-masing sebesar 0,000) lebih kecil dibandingkan dengan alpha 0,05. Sedangkan hipotesis 2b ditolak karena nilai signifikansinya (0,937) lebih besar jika dibandingkan dengan nilai alpha 0,05. Nilai adjusted r square untuk hipotesis 2a sebesar 0,854. Dengan demikian, variasi belanja publik dapat dijelaskan oleh dana perimbangan sebesar 85,4% dan 14,6% dijelaskan variabel lain di luar penelitian. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah berpengaruh positif pada kenaikan belanja publik.

### **SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN**

Penelitian ini telah dapat membuktikan secara empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Desentralisasi fiskal lebih menitikberatkan pada desentralisasi pengeluaran dan belum diimbangi oleh desentralisasi penerimaan. Hal ini membawa konsekuensi yang cukup menantang bagi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan desentralisasi penerimaan bagi daerah itu sendiri.

Dengan adanya dana perimbangan, maka akan membawa pengaruh positif terhadap besarnya pendapatan asli daerah. Transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah tidak akan menjadikan pemerintah daerah tersebut mengandalkan sumber dana belanjanya hanya dari dana transfer tersebut. Namun, secara empiris, besarnya dana perimbangan dari pemerintah pusat mempunyai pengaruh dalam meningkatkan pendapatan di Kab/Kota di Pulau Jawa.

Penelitian ini juga berhasil membuktikan pengaruh positif desentralisasi fiskal terhadap besarnya belanja publik. Transfer dana perimbangan ke daerah dan penerimaan lain-lain yang sah mempengaruhi jumlah belanja publik daerah. Sedangkan variabel pinjaman daerah mempunyai pengaruh yang kurang signifikan bila dibandingkan dengan variabel dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah.

Oleh sebab itu, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya kondisi daerah di Indonesia yang beragam dan berbeda-beda, maka pola desentralisasi, khususnya desentralisasi fiskal, memang tepat untuk diimplementasikan di Indonesia, karena memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah untuk mengelola

dan mengatur sumberdaya sesuai dengan kepentingan masyarakat daerahnya dan mengurangi kesenjangan antar daerah.

### **Saran**

Peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam rangka perbaikan dan pengembangan penelitian selanjutnya, yang meliputi:

1. Untuk penelitian berikutnya menambah jumlah sampel yang digunakan guna meningkatkan daya generalisasi.
2. Menambah rentang waktu pengamatan sehingga data semakin valid, menguji pengaruh komponen-komponen dana perimbangan seperti DAU, DAK dan bagi hasil terhadap PAD dan belanja publik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ananda, Candra Fajri. 2002. *Problems of the Implementation of Fiscal Decentralization in Regional Autonomy: The Case of Malang Municipality and Trenggalek District*. Regional University Research On Decentralization in Indonesia. Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS) University of Maryland at College Park.
- Bahl, Roy, (1999), *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*, World Bank Institute, Washington.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bird, Richard M dan Francois Vaillancourt. 2000. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Brodjonegoro, Bambang and Jorge Martinez (2002), "An Analysis of Indonesia's Transfer System : Recent Performance and Future Prospects", presented at *The Andrew Young School of Policy Studies sponsored conference on "Can Decentralization Help Rebuild Indonesia ?"*, Georgia State University, Atlanta.
- Davey, K.J., 1988, *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, UI-Press, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2006, *Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS*, Edisi 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Halim, Abdul. 2001. *Anggaran Daerah dan "Fiscal Stress" (Sebuah Studi Kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia)*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 16 (4): 346-357.
- Halim, Abdul, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.
- Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA).2002.Sinopsis Hasil Penelitian.
- Jin, Hehui;Yingyi Qian dan Barry R. Weingast. 1999. *Regional Decentralization and Fiscal Incentives: Federalism, Chinese Style. Working Paper*. Stanford University.
- Khusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang* : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Litvack, Jenie dan Seddon (2002), *Decentralization*, Washington DC: World Bank.
- Mardiasmo, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan UGM Yogyakarta.
- Musgrave, Richard A. dan Musgrave, Peggy B., 1993, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* , Edisi V, Erlangga, Jakarta.
- Purwanto, Agus, 2007, *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Pulau Jawa*, Tesis, Magister Sains Akuntansi, UGM, Yogyakarta.
- Sekaran, Uma. (2006). *Research Methods For Business*, Salemba Empat.
- Sidik, Machfud, B. Raksasa Mahi, Robert Simanjuntak, & Bambang Brodjonegoro. 2002. *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Syukriy, Abdullah., & Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jurnal Ekonomi 13 (2): 90- 109.
- Waluyo, Joko. 2007. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Indonesia*.
- Zhang, Tao, dan Heng-fu Zou. "Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China." *Journal of Public Economics*, 1998, 67, pp. 221-240.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

**LAMPIRAN I**  
**PENGUJIAN NORMALITAS MODEL RESIDUAL**

**Model 1**

		Unstandardized Residual
N		386
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4357,15775787
Most Extreme Differences	Absolute	,414
	Positive	,414
	Negative	-,381
Kolmogorov-Smirnov Z		,747
Asymp. Sig. (2-tailed)		,884

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

**Model 1**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		386
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	160950,91955508
Most Extreme Differences	Absolute	,451
	Positive	,451
	Negative	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		,698
Asymp. Sig. (2-tailed)		,714

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

**LAMPIRAN II**  
**PENGUJIAN AUTOKORELASI**

**Model 1**  
**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,929(a)	,864	,854	166877,46 521	2,005

a Predictors: (Constant), PLL, PD, DP

b Dependent Variable: BP

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	26668,0 17	27305,3 21		,977	,335
	DP	,897	,225	,587	3,981	,000
	PD	-,821	10,330	-,005	-,080	,937
	PLL	5,533	2,149	,367	2,575	,014

a Dependent Variable: BP

**Model 2**  
**Model Summary(b)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,996(a)	,992	,992	4517,5973 2	1,863

a Predictors: (Constant), PLL, PD, DP

b Dependent Variable: PAD

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	-334,655	739,192		-,453	,653
	DP	-,022	,006	-,129	-3,672	,001
	PD	1,481	,280	,082	5,296	,000
	PLL	1,878	,058	1,100	32,294	,000

a Dependent Variable: PAD

**LAMPIRAN III****PENGUJIAN MULTIKOLINIARITAS****Variables Entered/Removed(b)**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PLL, PD, DP(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PAD

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-334,655	739,192		-,453	,653		
	DP	-,022	,006	-,129	-3,672	,001	,157	6,373
	PD	1,481	,280	,082	5,296	,000	,822	1,216
	PLL	1,878	,058	1,100	32,294	,000	,168	5,946

a Dependent Variable: PAD



**Collinearity Diagnostics(a)**

Model	Dimensio n	Eigenvalue (Constant)	Condition Index DP	Variance Proportions			
				PD	PLL	(Constant )	DP
1	1	2,230	1,000	,05	,02	,03	,02
	2	,903	1,572	,05	,01	,67	,03
	3	,793	1,677	,86	,01	,13	,01
	4	,074	5,483	,04	,96	,17	,94

a Dependent Variable: PAD

**LAMPIRAN IV  
PENGUJIAN HETEROSKEDASTISTAS  
Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-	45225,978		-	,000
	DP	159008,099	2,968	-,119	3,516	,675
	PD	1,088	42,832	-,020	-,367	,601
	PLL	-22,416	,645	-,073	-,523	,105
		-1,049			1,626	

a Dependent Variable: absU

**Hipotesis Ia, 1b dan 1c**

**Variables Entered/Removed(b)**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PLL, PD, DP(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: PAD

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,996(a)	,992	,992	4517,59732

a Predictors: (Constant), PLL, PD, DP

**ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	103791224373,620	3	34597074791,207	1695,213	,000(a)
	Residual	816347420,261	40	20408685,507		
	Total	104607571793,881	43			

a Predictors: (Constant), PLL, PD, DP

b Dependent Variable: PAD

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-334,655	739,192		-,453	,653
	DP	-,022	,006	-,129	-3,672	,001
	PD	1,481	,280	,082	5,296	,000
	PLL	1,878	,058	1,100	32,294	,000

a Dependent Variable: PAD

**Hipotesis 2a, 2b dan 2c**

**Variables Entered/Removed(b)**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	PLL, PD, DP(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: BP

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,929(a)	,864	,854	166877,46521

a Predictors: (Constant), PLL, PD, DP

**ANOVA(b)**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7060113197027,350	3	2353371065675,785	84,507	,000(a)
	Residual	1113923535741,901	40	27848088393,548		
	Total	8174036732769,250	43			

a Predictors: (Constant), PLL, PD, DP

b Dependent Variable: BP

**Coefficients(a)**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26668,017	27305,321		,977	,335
	DP	,897	,225	,587	3,981	,000
	PD	-,821	10,330	-,005	-,080	,937
	PLL	5,533	2,149	,367	2,575	,014

a Dependent Variable: BP